

Menteri Rini: Utang BUMN Hanya Rp 2.000 T,

Bukan Rp 5.000 T

Reporter: **Antara**

Editor: **Dewi Rina Cahyani**

Jumat, 14 Desember 2018 09:21 WIB



Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) disaksikan Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga (kiri) menyaksikan acara Spirit of Millennials Games Day 2018 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 Desember 2018. Kementerian BUMN bersama PT Telkom Indonesia menggelar ajang Spirit of Millennials Games Day untuk memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi karyawan muda yang akan dibentuk di masing-masing BUMN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Rini Soemarno menegaskan bahwa [utang BUMN](#) hanya berkisar Rp 2.000 triliun, bukan Rp 5.000 triliun. "Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun," tutur Menteri Rini di Jakarta, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Baca: [Sandiaga soal Utang BUMN Lebih dari Rp 5.000 T : It's Worrying](#)

Dia menjelaskan bahwa jumlah Rp 5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan. Hal itu adalah sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Kalau perbankan memang hanya simpan-pinjam. "Untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan," kata Rini.

Kedua, menurut dia, selama BUMN ini korporasi yang berutang demi kepentingan pembangunan atau untuk sesuatu yang produktif dan pengembaliannya jelas, hal itu tidak masalah. "Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau

bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," ujar Rini.

Dia juga menyebut bahwa BUMN sendiri menyumbang hampir Rp 380 triliun terhadap APBN 2018, terdiri atas dividen, pajak, PNBP. "Jadi untuk ke negara saja, BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu kita hampir Rp 380 triliun masuk ke APBN. Ini besar," ujarnya.

"Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi bertambah," ujarnya saat menghadiri event Spirit of Millennials Games Day 2018.

Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp 2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut [utang BUMN](#) menembus sekitar Rp 5.000 triliun. "Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan," ujar Aloysius pekan lalu saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di Jakarta.

ANTARA